



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 16 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR PM 36 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan, serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/282/M.KT.01/2023 Tanggal 27 Februari 2023 Perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 942);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 36 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 692) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan:

- a. Nomor PM 135 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1401);
- b. Nomor PM 76 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1183);
- c. Nomor PM 71 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 942);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Pasal 30 dihapus.



3. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dapat dibentuk wilayah kerja sesuai kebutuhan berdasarkan analisis organisasi dan beban kerja;
- (2) Wilayah kerja merupakan organisasi non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan yang membawahnya;
- (3) Wilayah kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas membantu Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dalam melaksanakan tugas pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan;
- (4) Pembentukan atau perubahan wilayah kerja ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut setelah mendapatkan persetujuan Menteri Perhubungan.
- (5) Perubahan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti dengan melakukan perubahan Peraturan Menteri Perhubungan ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

4. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Jumlah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) lokasi, terdiri atas:
  - a. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I sebanyak 13 (tiga belas) lokasi;
  - b. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II sebanyak 18 (delapan belas) lokasi;
  - c. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III sebanyak 17 (tujuh belas) lokasi;
  - d. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV sebanyak 49 (empat puluh sembilan) lokasi.
- (2) Nama kantor, lokasi, dan wilayah kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

5. Pasal 45A dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 135 Tahun 2015 dihapus.

6. Pasal 45A dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2018 dihapus.
7. Pasal 45B dihapus.
8. Di antara Pasal 45B dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 45C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45C

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan struktural dan fungsional yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

9. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012, Lampiran I Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2018, dan Lampiran II Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2021, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Mei 2023

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Mei 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 400

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

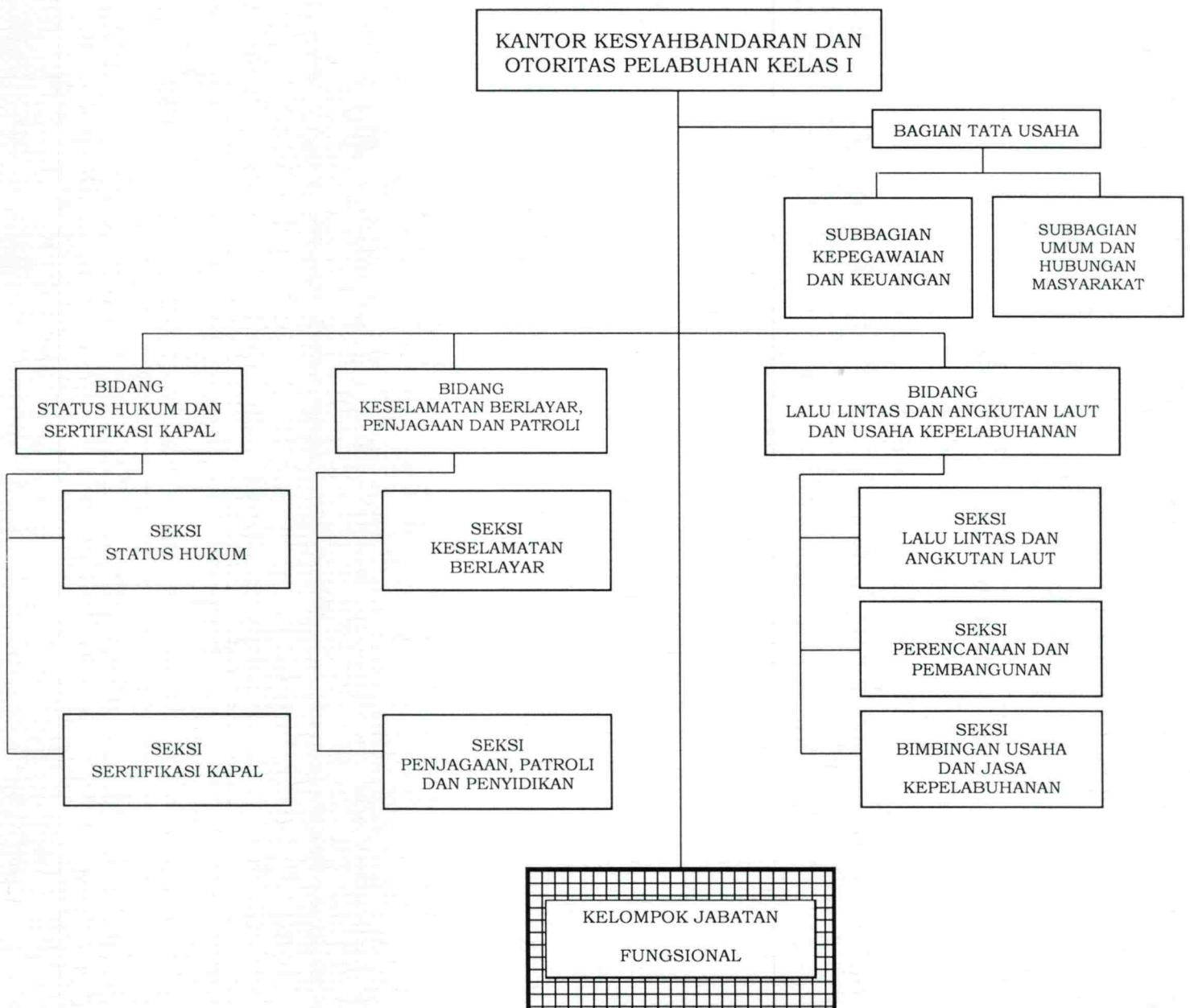
The image shows a circular official stamp of the Ministry of Communication and Information (KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DAN INFORMASI) of the Republic of Indonesia. The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'F. Budi Prayitno'.

F. BUDI PRAYITNO

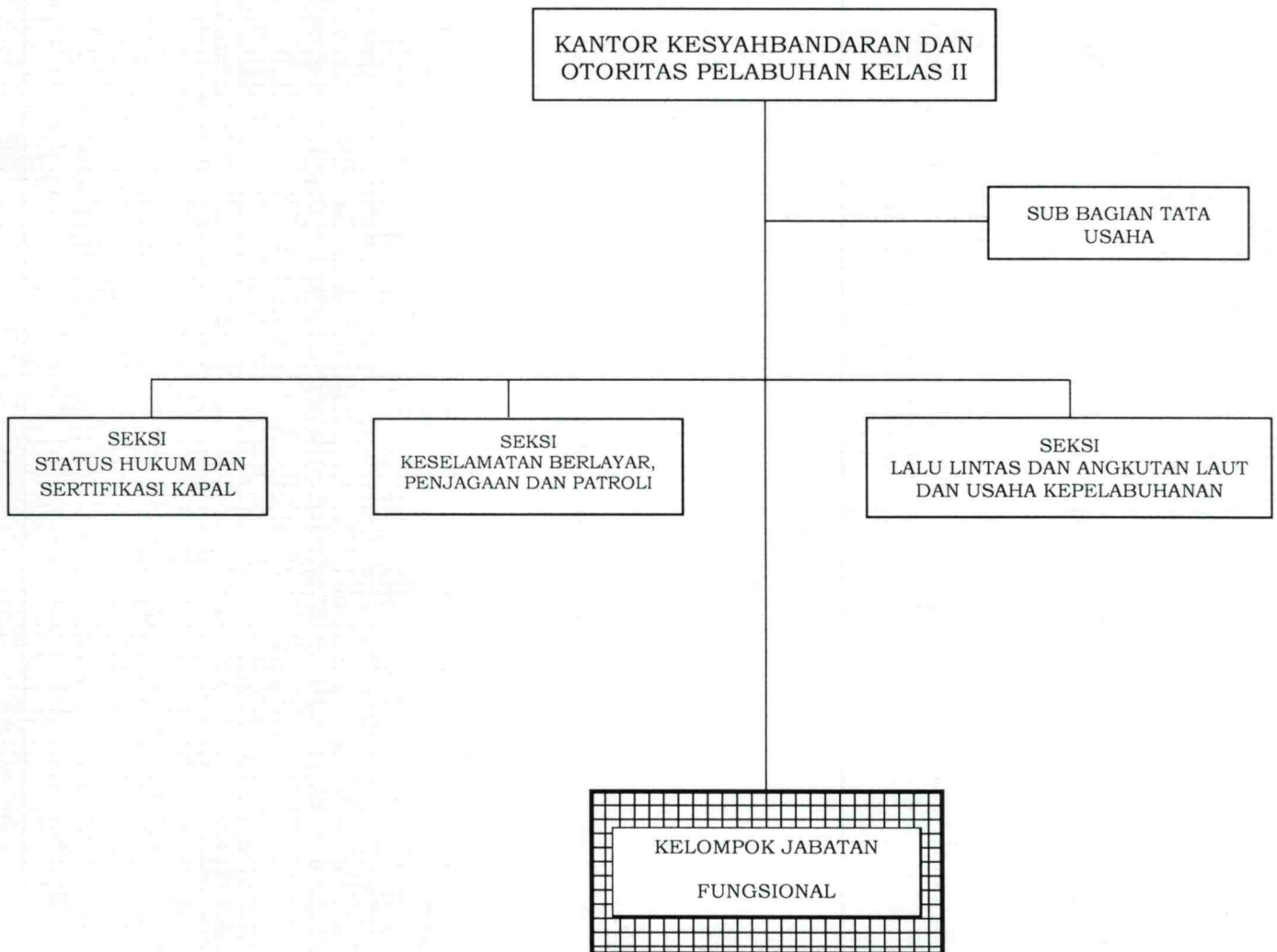


LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 16 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN  
MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 36  
TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN  
TATA KERJA KANTOR KESYAHBANDARAN  
DAN OTORITAS PELABUHAN

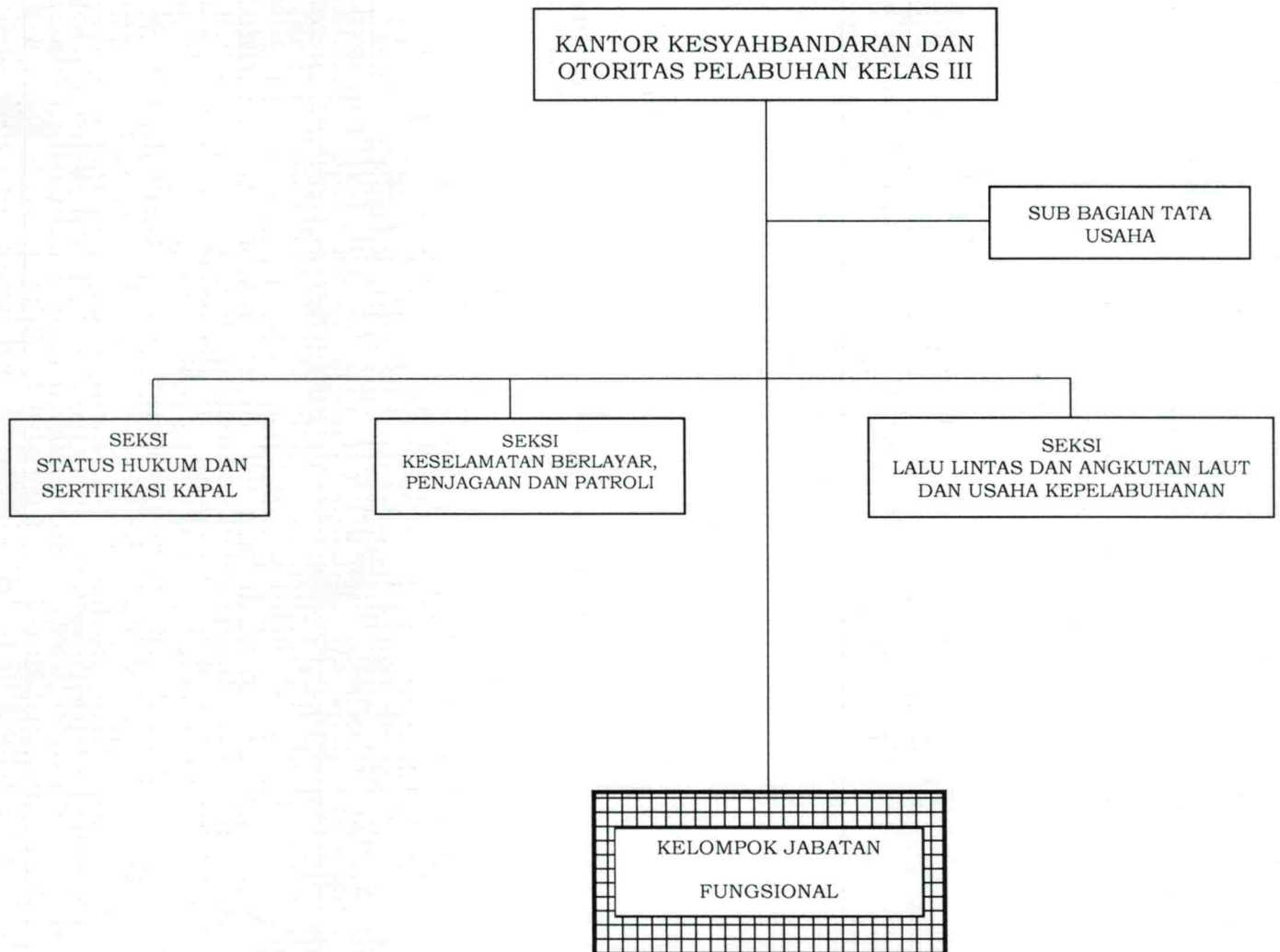
A. STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I



B. STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II

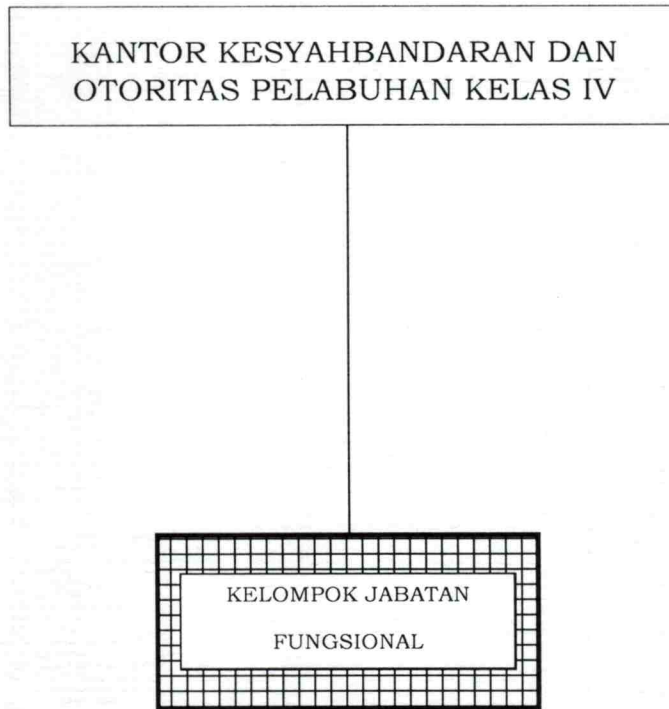


C. STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS III





D. STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV



E. DAFTAR NAMA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

1. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I

| NO | NAMA   | LOKASI                          | WILAYAH KERJA  |
|----|--|---------------------------------|--|
| 1. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai                 | Dumai, Riau                     | 1) Lubuk Gaung<br>2) Pelintung<br>3) Batu Panjang<br>4) Darul Anam<br>5) Tanjung Kapal<br>6) Gunap<br>7) Selat Morong  |
| 2. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Palembang             | Palembang, Sumatera Selatan     | 1) Tanjung Api-Api<br>2) Prambatan<br>3) Sungai Lilin<br>4) Karang Agung<br>5) Gandus<br>6) Jakabaring<br>7) Musi Rawas  |
| 3. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang               | Panjang, Lampung                | 1) Sebalang<br>2) Rangai<br>3) Teluk Betung<br>4) Ketapang Padang Cermin<br>5) Legundi   |
| 4. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Balai Karimun | Karimun, Kepulauan Riau         | 1) Pasir Panjang<br>2) Pulau Buru<br>3) Pulau Sambu<br>4) Tanjung Batu Kundur<br>5) Pulau Bulan<br>6) Pulau Jangkat<br>7) Pulau Nipah<br>8) Moro<br>9) Penyalai<br>10) Sekumbang<br>11) Tanjung Berlian<br>12) Pulau Durai |
| 5. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas          | Semarang, Jawa Tengah           | Kendal   |
| 6. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten                | Banten, Banten                  | Terate   |
| 7. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Pontianak             | Pontianak, Kalimantan Barat     | 1) Mempawah<br>2) Sungai Kakap<br>3) Teluk Pakedai<br>4) Kubu  |
| 8. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banjarmasin           | Banjarmasin, Kalimantan Selatan | Sungai Putting   |

| NO  | NAMA  | LOKASI                      | WILAYAH KERJA  |
|-----|---|-----------------------------|--|
| 9.  | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan | Semayang, Kalimantan Timur  | Mentawir   |
| 10. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Samarinda  | Samarinda, Kalimantan Timur | 1) Mahakam Hulu<br>2) Sanga-sanga<br>3) Muara Berau  |
| 11. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Bitung     | Bitung, Sulawesi Utara      | Kema   |
| 12. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Ambon      | Ambon, Maluku               | -  |
| 13. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Sorong     | Sorong, Papua Barat         | 1) Kalobo<br>2) Makbon<br>3) Mega<br>4) Tanjung Kasuari<br>5) Saoka<br>6) Kawasan Arar<br>7) Seget<br>8) Sele<br>9) Salawati<br>10) Sausapor |

## 2. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II

| NO | NAMA   | LOKASI                         | WILAYAH KERJA   |
|----|--|--------------------------------|---|
| 1. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Teluk Bayur    | Padang, Sumatera Barat         | 1) Air Bangis<br>2) Tiku<br>3) Sasak<br>4) Pariaman<br>5) Carocok Terusan<br>6) Carocok Painan<br>7) Panasahan Painan<br>8) Bungus<br>9) Muara Padang |
| 2. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Pekanbaru      | Pekanbaru, Riau                | 1) Siak Sri Indrapura<br>2) Buatan  |
| 3. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton  | Bengkalis, Riau                | 1) Bukit Batu<br>2) Lubuk Muda<br>3) Sungai Pakning<br>4) Sungai Apit<br>5) Bandul  |
| 4. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Pinang | Tanjung Pinang, Kepulauan Riau | 1) Dompok<br>2) Pangkil<br>3) Tanjung Moch  |
| 5. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Marunda        | Jakarta Utara, DKI Jakarta     | 1) Tarumajaya<br>2) Tarumanegara<br>3) Marunda Centre<br>4) Muara Tawar   |
| 6. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon        | Cirebon, Jawa Barat            | 1) Kejawanan<br>2) Bondet<br>3) Astanajapura  |



| NO  | NAMA   | LOKASI                       | WILAYAH KERJA  |
|-----|--|------------------------------|--|
|     |  |                              | 4) Gebang Mekar  |
| 7.  | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Patimban           | Subang, Jawa Barat           | 1) Blanakan<br>2) Mayangan<br>3) Muara Ciasem<br>4) Ciparage<br>5) Sungai Buntu<br>6) Muara Bendera<br>7) Muara Gembong  |
| 8.  | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cilacap            | Cilacap, Jawa Tengah         | Bunton   |
| 9.  | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Gresik             | Gresik, Jawa Timur           | Ujung Pangkah  |
| 10. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Benoa              | Denpasar, Bali               | 1) Serangan<br>2) Tanjung Benoa<br>3) Kedonganan<br>4) Sanur   |
| 11. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kotabaru-Batulicin | Kotabaru, Kalimantan Selatan | 1) Sebuku<br>2) Tanjung Batu<br>3) Gunung Batu Besar<br>4) Sungai Dua<br>5) Setangga<br>6) Serongga<br>7) Matasiri<br>8) Marabatuan  |
| 12. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Bontang            | Bontang, Kalimantan Timur    | -  |
| 13. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tarakan            | Tarakan, Kalimantan Utara    | 1) Malinau<br>2) Bangkudulis<br>3) Bebatu<br>4) Sesayap  |
| 14. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Teluk Palu         | Palu, Sulawesi Tengah        | 1) Wani<br>2) Donggala<br>3) Labuan<br>4) Dalaka<br>5) Toaya<br>6) Masaingi<br>7) Tibo<br>8) Batusuya<br>9) Alindau<br>10) Tompe<br>11) Sibayu<br>12) Loli Oge<br>13) Surumana |
| 15. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kendari            | Kendari, Sulawesi Tenggara   | 1) Soropia<br>2) Tinanggea<br>3) Sawa<br>4) Wawatu   |
| 16. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Baubau             | Baubau, Sulawesi Tenggara    | 1) Banabungi<br>Pasarwajo<br>2) Talaga Raya  |

| NO  | NAMA   | LOKASI                | WILAYAH KERJA  |
|-----|--|-----------------------|--|
|     |  |                       | 3) Sikeli<br>4) Lasalimu<br>5) Batu Atas<br>6) Liana Banggai<br>7) Lawele<br>8) Kadatua<br>9) Siompu<br>10) Wamengkoli |
| 17. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Ternate  | Ternate, Maluku Utara | 1) Sulamadah<br>2) Hiri<br>3) Tifure<br>4) Mayau<br>5) Moti  |
| 18. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Jayapura | Jayapura, Papua       | 1) Demta<br>2) Depapre<br>3) Muara Tami<br>4) Holtekam   |

### 3. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III

| NO | NAMA   | LOKASI                     | WILAYAH KERJA   |
|----|--|----------------------------|---|
| 1. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kuala Tanjung | Batubara, Sumatera Utara   | 1) Medang Deras<br>2) Pangkalan Dodek<br>3) Desa Lalang<br>4) Tanjung Tiram   |
| 2. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Talang Duku   | Muaro Jambi, Jambi         | -   |
| 3. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Pulau Baai    | Bengkulu, Bengkulu         | 1) Ketahum<br>2) Muko-Muko<br>3) Pulau Tikus  |
| 4. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kijang        | Bintan, Kepulauan Riau     | 1) Kawal<br>2) Numbing  |
| 5. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sunda Kelapa  | Jakarta Utara, DKI Jakarta | 1) Pantai Mutiara<br>2) Muara Baru  |
| 6. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tanjung Wangi | Banyuwangi, Jawa Timur     | 1) Pulau Tabuhan<br>2) Ketapang<br>3) Muncar<br>4) Blimbing Sari<br>5) Pancer<br>6) Grajagan<br>7) Boom<br>8) Puger |
| 7. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tanjung Pakis | Lamongan, Jawa Timur       | 1) Brondong<br>2) Tanjung Awar-Awar<br>3) Jenu<br>4) Karang Agung<br>5) Paciran<br>6) Pacitan                       |



| NO  | NAMA  | LOKASI                                | WILAYAH KERJA  |
|-----|---|---------------------------------------|--|
| 8.  | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Lembar       | Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat     | 1) Jeranjang<br>2) Teluk Sepi<br>3) Labuhan Poh-Sekotong<br>4) Teluk Awang                 |
| 9.  | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Labuan Bajo  | Manggarai Barat, Nusa Tenggara Barat  | 1) Komodo<br>2) Rinca<br>3) Bari<br>4) Nangalili   |
| 10. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kupang       | Kupang, Nusa Tenggara Timur           | 1) Pelabuhan Tenau<br>2) Nunbaun Sabu<br>3) Kolbano<br>4) Semau<br>5) Sulamu<br>6) Boking  |
| 11. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sampit       | Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah | 1) Kuala Kuayan<br>2) Parenggean<br>3) Samuda<br>4) Pegatan Mendawai<br>5) Sungai Sebangau |
| 12. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Rangka Ilung | Barito Selatan, Kalimantan Tengah     | 1) Kelanis<br>2) Buntok  |
| 13. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Satui        | Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan       | 1) Sei Cuka<br>2) Angsana<br>3) Sabamban<br>4) Sungai Loban<br>5) Setarap                  |
| 14. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Manado       | Manado, Sulawesi Utara                | 1) Tumumpa<br>2) Tanah Wangko  |
| 15. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Pare-Pare    | Pare-Pare, Sulawesi Selatan           | Marabombang  |
| 16. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Gorontalo    | Gorontalo, Gorontalo                  | Kabila Bone  |
| 17. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Biak         | Biak Numfor, Papua                    | 1) Bosnik<br>2) Wardo  |

#### 4. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV

| NO | NAMA   | LOKASI           | WILAYAH KERJA             |
|----|--|------------------|---------------------------|
| 1. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Sabang       | Sabang, Aceh     | Balohan                   |
| 2. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kuala Langsa | Langsa, Aceh     | 1) Idi<br>2) Kuala Beukah |
| 3. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Meulaboh     | Aceh Barat, Aceh | Kuala Bubon               |



| NO  | NAMA   | LOKASI                        | WILAYAH KERJA   |
|-----|--|-------------------------------|---|
| 4.  | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Lhoksumawe           | Aceh Utara, Aceh              | -   |
| 5.  | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Malahayati           | Banda Aceh, Aceh              | 1) Pulo Aceh<br>2) Lhoknga<br>3) Sigli  |
| 6.  | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkalan Susu       | Langkat, Sumatera Utara       | 1) Pangkalan Brandan<br>2) Tanjung Pura<br>3) Kuala Serapuh<br>4) Tapak Kuda/<br>Jaringan Halus<br>5) Pulau Kampai<br>6) Pulau Sembilan |
| 7.  | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Sibolga              | Sibolga, Sumatera Utara       | -   |
| 8.  | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tanjung Balai Asahan | Asahan, Sumatera Utara        | Bagan Asahan  |
| 9.  | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Gunung Sitoli        | Gunung Sitoli, Sumatera Utara | -   |
| 10. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kuala Cinaku         | Indragiri Hulu, Riau          | -   |
| 11. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kuala Enok           | Indragiri Hilir, Riau         | Muaro Bakong  |
| 12. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tembilahan           | Indragiri Hilir, Riau         | -   |
| 13. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Bagan Siapi-api      | Rokan Hilir, Riau             | 1) Sinaboi<br>2) Pulau Halang   |
| 14. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Bengkalis            | Bengkalis, Riau               | 1) Teluk Pambang<br>2) Bantan Tengah  |
| 15. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selat Panjang        | Kepulauan Meranti, Riau       | 1) Tanjung Samak<br>2) Tanjung Kedabu<br>3) Teluk Belitung  |
| 16. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kuala Tungkal        | Tanjung Jabung Barat, Jambi   | Kuala Betara  |
| 17. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Muara Sabak          | Tanjung Jabung Timur, Jambi   | -   |
| 18. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Bakauheni            | Lampung Selatan, Lampung      | 1) Kalianda<br>2) Ketapang<br>3) Muara Piluk<br>4) Kampung Sumur  |

| NO  | NAMA   | LOKASI                                   | WILAYAH KERJA   |
|-----|--|--|---|
| 19. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam    | Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung | 1) Belinyu<br>2) Sungai Liat<br>3) Sei Selan  |
| 20. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tanjung Pandan   | Belitung, Kepulauan Bangka Belitung      | 1) Tanjung Batu<br>2) Tanjung Roe   |
| 21. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Muntok           | Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung  | Tanjung Ular  |
| 22. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kepulauan Seribu | Kepulauan Seribu, DKI Jakarta            | 1) Untung Jawa<br>2) Pulau Lancang<br>3) Pulau Tidung<br>4) Pulau Pramuka<br>5) Pulau Kelapa                                      |
| 23. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Muara Angke      | Jakarta Utara, DKI Jakarta               | Muara Kamal   |
| 24. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal            | Tegal, Jawa Tengah                       | 1) Jongor Tegalsari<br>2) Larangan<br>3) Pekalongan<br>4) Wiradesa<br>5) Pemalang<br>6) Brebes<br>7) Losari                       |
| 25. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kalianget        | Sumenep, Jawa Timur                      | 1) Pasongsongan<br>2) Ambunten<br>3) Pragaan<br>4) Giligenting<br>5) Tanjung Saronggi<br>6) Pagerbatu<br>7) Dungkek<br>8) Bintaro |
| 26. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Panarukan        | Situbondo, Jawa Timur                    | 1) Pasir Putih<br>2) Besuki<br>3) Kalbut<br>4) Jangkar<br>5) Meimbo   |
| 27. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Probolinggo      | Probolinggo, Jawa Timur                  | 1) Kalibuntu<br>2) Paiton<br>3) Pasuruan<br>4) Lekok<br>5) Sendang Biru<br>6) Prigi<br>7) Grati                                   |
| 28. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Padangbai        | Karangasem, Bali                         | 1) Manggis<br>2) Amed<br>3) Kubu<br>4) Tanah Ampo   |
| 29. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Celukan Bawang   | Buleleng, Bali                           | 1) Pegametan<br>2) Brombong<br>3) Buleleng<br>4) Pamaron  |



| NO  | NAMA   | LOKASI                                | WILAYAH KERJA   |
|-----|--|---------------------------------------|---|
|     |  |                                       | 5) Lovina<br>6) Sangsit   |
| 30. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Badas          | Sumbawa, Nusa Tenggara Barat          | 1) Pulau Moyo<br>2) Teluk Santong<br>3) Pelabuhan Jambu<br>4) Prenang       |
| 31. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Bima           | Bima, Nusa Tenggara Barat             | -   |
| 32. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Laurentius Say | Sikka Maumere, Nusa Tenggara Timur    | 1) Wuring<br>2) Pemana<br>3) Sukun<br>4) Palue<br>5) Kawapante              |
| 33. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Ende           | Ende, Nusa Tenggara Timur             | 1) Pulau Ende<br>2) Maurole<br>3) Ropa                                      |
| 34. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kalabahi       | Alor, Nusa Tenggara Timur             | 1) Maritaing<br>2) Moru<br>3) Alor Kecil                                    |
| 35. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Waingapu       | Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur      | 1) Baing<br>2) Pulau Salura<br>3) Katundu<br>4) Melolong                    |
| 36. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Sintete        | Sambas, Kalimantan Barat              | 1) Tambelan<br>2) Sambas<br>3) Singkawang<br>4) Pemangkat<br>5) Sungai Duri |
| 37. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Ketapang       | Ketapang, Kalimantan Barat            | 1) Satong<br>2) Pesaguan<br>3) Pasar Sentap                                 |
| 38. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkalan Bun  | Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah | -   |
| 39. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pulang Pisau   | Pulang Pisau, Kalimantan Tengah       | 1) Batanjung<br>2) Bukit Pinang   |
| 40. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Sukamara       | Sukamara, Kalimantan Tengah           | 1) Kuala Jelai<br>2) Jambi<br>3) Balai Riang                                |
| 41. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kumai          | Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah | -   |
| 42. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Nunukan        | Nunukan, Kalimantan Timur             | 1) Sebuksu<br>2) Sebakis<br>3) Semenggaris                                  |
| 43. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Toli-Toli      | Toli-Toli, Sulawesi Tengah            | Laulalang   |



| NO  | NAMA  | LOKASI                     | WILAYAH KERJA  |
|-----|---|----------------------------|--|
| 44. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Garongkong  | Barru, Sulawesi Selatan    | 1) Pancana<br>2) Labuange<br>3) Bawa Salo<br>4) Awerange                       |
| 45. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Anggrek     | Gorontalo Utara, Gorontalo | 1) Tolinggula<br>2) Monano<br>3) Sumalata<br>4) Bolontio<br>5) Biao            |
| 46. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Banda Naira | Maluku Tengah, Maluku      | Kumber   |
| 47. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Merauke     | Merauke, Papua             | 1) Kumbe<br>2) Bian<br>3) Wanam<br>4) Erambu<br>5) Semangga<br>6) Tanah Miring |
| 48. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Manokwari   | Manokwari, Papua Barat     | 1) Maruni<br>2) Sowi Marmpa<br>3) Saukorem<br>4) Kaironi                       |
| 49. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Fak-Fak     | Fak-Fak, Papua Barat       | 1) Karas<br>2) Weri  |

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO